

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta
- NI'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, UII Press, Yogyakarta
- Otto Soemarwoto, 2001, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Philipus.M.Hadjon, 1996, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Media Pratama, Jakarta
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Salim HS, 2007, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Edisi Revisi, PT RajaGrafindo, Persada, Jakarta
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan*, Airlangga University Press
- Sjachran Basah, 1960, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, lumni, Bandung, 1985, hlm 12. Lihat juga E. Utrecht dalam *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, FH UNPAD,
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.
- St, Munadjat Danusaputra, 1980, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Bandung.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang – Undangan :

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 09; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07).

C. Internet :

<http://blog.unnes.ac.id/triyuliana/2015/11/09/pemanfaatan-penambangan-pasir-sungai-serayu-peralihan-masyarakat-pertanian-menuju-masyarakat-penambang-di-desa-gumingsir-kec-wanadadi-kab-banjarnegara/>

<http://mediaindonesia.com/news/read/65887/tambang-ilegal-keruk-pasir-serayu/2016-09-08>

[http : //www.tribunnews.com>bisnis>industri//](http://www.tribunnews.com>bisnis>industri//)